

MEDIA INDONESIA 22/7/03
“CAPITAL FLIGHT” DAN PENDIDIKAN TINGGI

Sofian Effendi¹

Selama hampir dua bulan PTN, khususnya yang telah berstatus PT-BHMN, mendapat sorotan tajam dari masyarakat gara-gara melakukan upaya optimalisasi daya tampung mereka. Oleh media kemudian upaya tersebut dipopulerkan sebagai “jalur khusus”. Lalu ada suara-suara yang menganalogikan jalan khusus itu dengan jalan tol. Menurut saya, analogi tersebut kurang tepat karena yang disebut “jalur khusus” yang dilakukan oleh PTN, paling tidak di UGM, adalah penerimaan calon mahasiswa tanpa test bagi para finalis olimpiade ilmu pengetahuan, juara nasional LPIR dan LKIR. Juga termasuk didalamnya upaya untuk mempertahankan UGM sebagai PT nasional melalui penjurangan bakat unggul daerah (PBUD), penjurangan bakat unggul kemitraan (PBUK), dan penjurangan bakat unggul atlet daerah (PBAD). Selain itu ada upaya memanfaatkan “daya tampung” yang tidak terpakai, yang dikenal sebagai Program Swadaya.

Pada semua PTN, setiap tahun ada sekitar 10-15 persen calon yang lulus ujian masuk tetapi tidak mendaftar kembali karena berbagai alasan. Di UGM, misalnya, selama bertahun-tahun ada sekitar 15 persen calon tidak mendaftar karena lebih memilih jurusan atau PT lain yang dipandang lebih sesuai dengan bidang pilihan calon. Tahun lalu misalnya, sekitar 690 calon mahasiswa tidak jadi mendaftar dan “tempat” mereka tidak diisi oleh calon lain karena berbagai pertimbangan.

Kalau daya tampung yang “nganggur” ini tidak dimanfaatkan, negara sebenarnya rugi karena biaya yang dikeluarkan Pemerintah tetap sama, tanpa mempersoalkan apakah PTN bekerja dengan daya tampung penuh atau daya tampung 90 persen. Mungkin karena pertimbangan ini pula Dirjen Pendidikan Tinggi sering mengingatkan pimpinan PTN untuk terus meningkatkan efisiensi internal di perguruan masing-masing.

Sebagai PT-BHMN yang telah mendapatkan kewenangan mengelola diri sendiri, UGM pada tahun akademik 2003 berusaha mengoptimalkan daya tampungnya menjadi 100 persen dengan prinsip biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat. Karena itu disebut Program Swadaya.

¹ Guru Besar Kebijakan Publik dan Rektor Universitas Gadjah Mada.

Masyarakat mungkin belum memahami bahwa biaya pendidikan berbeda dari SPP dan BOP. Di universitas kerakyatan ini biaya pendidikan untuk mendidik seorang mahasiswa Program S-1 adalah rata-rata Rp. 11 juta per tahun. SPP dan BOP sejak tahun 2002 ditetapkan Rp. 2 juta untuk fakultas-fakultas non-eksakta dan Rp. 2,250 juta untuk fakultas-fakultas eksakta. Mahasiswa angkatan 2001 ke bawah lebih rendah SPP nya, sehingga uang kuliah rata-rata di universitas kerakyatan ini sekitar Rp. 1 juta setahun. Artinya, subsidi dari Pemerintah dan Universitas sekitar 91 persen.

Menghadapi gencarnya pemberitaan tentang komersialisasi PT, seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir. Juga terhadap upaya PTN untuk mengoptimalkan daya tampung. Kalau optimalisasi itu dilakukan secara wajar dan PTN tidak melakukan “dagang kursi” tindakan mereka seharusnya tidak perlu meresahkan masyarakat.

Masalah pendidikan tinggi yang paling menghawatirkan dan karenanya perlu mendapat perhatian dari semua pihak pada saat ini bukan optimalisasi kapasitas yang dihebohkan media sebagai “jalur khusus”. Persoalan utama kita adalah kesenjangan mutu yang semakin melebar antara PT Indonesia dengan PT luar negeri, akibat *political will* Pemerintah dan prioritas pembiayaan yang amat rendah.

Kalau pemerintah tidak mengambil langkah konkret untuk meningkatkan mutu sejak sekarang, lebih banyak orang tua yang mendambakan hari depan yang cerah bagi anak-anaknya, akan mengirimkan mereka ke PT luar negeri yang sudah barang tentu lebih mampu memberikan pendidikan bermutu tinggi. Gejala ini sudah berjalan hampir selama satu dekade dan cenderung semakin meningkat, Akibatnya, *national resources* yang harusnya dapat digunakan untuk membiayai peningkatan mutu perguruan tinggi dalam negeri telah dikuras untuk membiayai pendidikan tinggi di negara Australia, Amerika Serikat dan negara-negara Eropah. Masalah ini sempat menjadi renungan dalam Tajuk surat kabar Kompas edisi 17 Juni.

***Flight* dana pendidikan**

Banyak orang telah mengetahui kalau krisis ekonomi pada akhir dan pasca Pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan *capital flight* atau pelarian modal besar-besaran ke luar negeri. Tetapi, mungkin belum banyak yang menyadari bahwa dalam

pendidikan tinggi telah terjadi *capital flight* yang besar, dalam bentuk investasi orang tua untuk membiayai pendidikan anak mereka di universitas LN.

Menurut taksiran *Australian Educational Services*, pada tahun 2000, sebanyak 17.000 orang pelajar dan mahasiswa asal Indonesia menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan tinggi kejuruan mau pun umum di Negeri Kangguru tersebut. Para orang tua mereka rela membelanjakan Aus \$ 410 juta atau sekitar Rp. 2,4 trilyun per tahun demi putera-puteri agar mengenyam pendidikan berkualitas. Bila dimasukkan lembaga pendidikan di berbagai Negara di Eropah dan Benua Amerika, ada sekitar 60.000 pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana.

FLIGHT DANA PENDIDIKAN

Major Sector	No. of Students	Fees	Goods & services	Total
Higher Education Onshore	9,283	\$ 124 m	\$ 118 m	\$ 242 m
Vocational Education	3,764	\$ 40 m	\$ 46 m	\$ 86 m
School Education	2,079	\$ 20 m	\$ 23 m	\$ 43 m
ELICOS	2,305	\$ 22 m	\$ 18 m	\$ 40 m
Total	17,431	\$ 205 m	\$ 205 m	\$ 410 m

Sumber: Australian Education Service.

Berapa besar modal pembangunan sumber daya manusia yang mengalir keluar negeri untuk membiayai para pelajar dan mahasiswa yang mendambakan pendidikan tinggi berkualitas di luar negeri? Ternyata cukup besar, lebih dari Rp. 10 trilyun. Padahal di APBN 2003, anggaran untuk pendidikan tinggi tahun 2002 hanya Rp. 4,3 trilyun. Dengan kata lain, dana yang dikeluarkan oleh orang tua berada agar putra-puteri tercinta mendapat pendidikan tinggi bermutu, hampir 0,7 persen dari PDB Indonesia. Jumlah ini hampir sama dengan anggaran untuk pemerintah untuk pendidikan, yang hanya mencapai 0,8 persen dari PDB pada 2002. Kalau partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di dalam negeri setiap tahun sama besarnya dengan pengeluaran Pemerintah, maka "*capital flight*" dana nasional keluar negeri mencapai sepertiga dari total pengeluaran nasional untuk pendidikan.

Masalahnya tidak hanya sampai disitu. Lembaga pendidikan LN, biasanya mengenakan uang kuliah yang lebih tinggi pada mahasiswa asing, yang jumlahnya sekitar 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari biaya untuk warganegara. Tanpa disadari, bangsa Indonesia secara tidak langsung telah memberikan subsidi kepada negara yang lebih kaya melalui pendidikan tinggi.

Kesenjangan mutu

Sudah barang tentu kita tidak boleh menuduh orang tua mempunyai kurang nasionalis dalam pendidikan. Mereka rela mengeluarkan dana besar karena berharap anak-anak mereka mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi berkualitas tinggi di LN. Memang harus diakui, kualitas pendidikan tinggi di mancanegara memang berada di atas lembaga pendidikan nasional. Di kawasan Asia misalnya, mutu PT Indonesia berada pada peringkat 15 persen terendah dari 77 PT.

Di tingkat Asean pun tidak berbeda. PT nasional kita hanya mampu mencapai ranking 11, di bawah National University of Singapore, University of Malaysia dan Chulalongkorn University.

Perguruan tinggi di negara tetangga mampu mencapai mutu lebih tinggi karena pimpinan bangsa tersebut memberikan prioritas tinggi pada bidang pendidikan. Mereka sadar betul kalau gelombang globalisasi dan revolusi iptek yang sedang melanda kawasan ini harus dihadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia nasional yang semakin terdidik. Para pemimpin bangsa Malaysia, Muangthai dan Singapura rupanya sadar betul betapa penting nilai pendidikan bagi masa depan dan *survival* dari bangsa itu. Kiranya, komitmen seperti itu lah yang sedang ditunggu dunia pendidikan dari para pemimpin bangsa Indonesia.

Prof. Solow dalam tulisannya *Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education*, telah memperingatkan kita: “ ... *neglecting and providing inadequate support to higher education would cost the nation dearly in terms of its nation's competitiveness*”. Ternyata dukungan untuk pendidikan tinggi di Indonesia bukan saja terlalu rendah, bahkan dibandingkan dengan Vietnam, tetapi juga semakin lama semakin kecil. Pada 1980, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya 1,2 persen dari PDB, turun jadi 1,0 pada 1990, dan pada 2000 turun lagi menjadi 0,8 persen.

Pada 2003, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi hanya Rp. 13 trilyun, hanya sekitar 7 persen dari APBN atau 0,8 persen dari PDB. Pada kurun waktu yang sama, negara jiran Malaysia, menyediakan anggaran yang lebih besar, 5,2 persen dari PDB pada 1980, kemudian meningkat menjadi 5,5 persen pada 1990 dan 5,8 persen pada 2000.

Amanat UU Sisdiknas agar Pemerintah meningkatkan pengeluaran buat pendidikan menjadi 20 persen dari APBN, lebih kurang 5 persen dari PDB seperti di Malaysia atau sekitar Rp. 80 trilyun, nampaknya tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena itu perlu terobosan kebijakan untuk memperbaiki mutu akademik dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Selama ini kita belum memanfaatkan potensi pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan untuk pendidikan. Kiranya Pemerintah perlu mengadakan kebijakan *tax deduction* bagi individu dan perusahaan yang secara sukarela memberikan sumbangan untuk *Endowment Fund* di lembaga penyelenggara pendidikan.

Sayangnya, UU Sisdiknas, UU Keuangan mau pun UU Perpajakan belum menyentuh sama sekali mobilisasi dana masyarakat tersebut guna mempercepat transformasi sistem pendidikan nasional.

Tampaknya wacana yang berkembang di masyarakat belum menulik sampai ke *substantive problem* yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan nasional umumnya dan dunia pendidikan tinggi khususnya. Perbincangan yang rama baru mampu menyentuh isu “kulit” pendidikan tinggi seperti jalur khusus, komersialisasi, privatisasi, dan MacDonaldisasi. Bukan isu substantive seperti rendahnya mutu dan relevansi, ketimpangan akses pendidikan tinggi, serta factor penyebabnya.

Yogyakarta, 6 Juli 2003